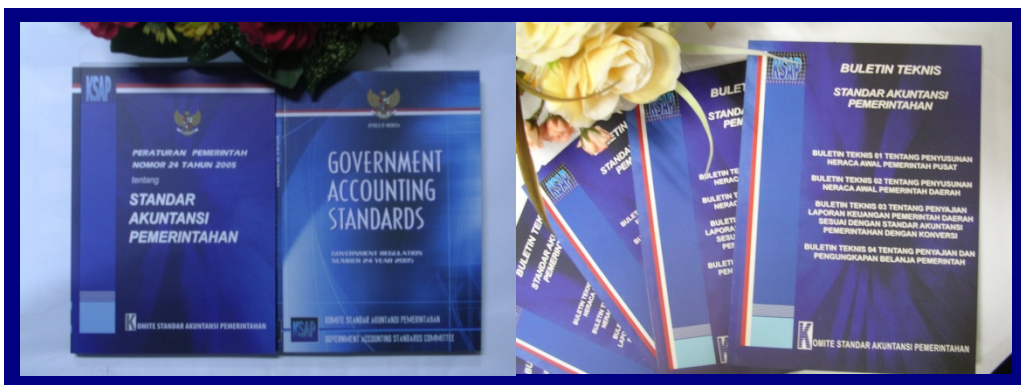




LAPORAN TAHUNAN 2007

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN



ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY



**KOMITE STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

**LAPORAN TAHUNAN
2007**

ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY

**SAMBUTAN
KETUA KOMITE KONSULTATIF
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) mengemban tugas yang berat dalam menyusun standar akuntansi pemerintahan yang harus diterapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Standar tersebut disusun dengan memperhatikan konsep, prinsip, dan praktik akuntansi yang baik, serta mudah dipahami bagi para pengguna sehingga dapat diimplementasikan dengan baik.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Setelah SAP ditetapkan, tugas berikutnya dari KSAP adalah melakukan sosialisasi dan membantu implementasi SAP pada unit-unit instansi di pemerintah pusat dan daerah.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, SAP berbasis akrual sudah harus dilaksanakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah untuk tahun anggaran 2009. Untuk melaksanakan amanat tersebut, mulai tahun 2006, KSAP telah melakukan kajian-kajian dan mulai menyusun draf SAP berbasis akrual yang disempurnakan melalui pembahasan-pembahasan yang mendalam selama tahun 2007 agar dapat diselesaikan pada tahun 2008.

Rencana kerja dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh KSAP selama tahun 2007 tersebut telah disusun dengan lengkap dan sistematis dalam Laporan Tahunan 2007, agar dapat menjadi media akuntabilitas dan transparansi kepada para *stakeholders*, khususnya Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Komite Konsultatif atas saran-saran yang telah diberikan kepada KSAP dalam melaksanakan tugasnya selama ini, dan kepada para anggota Komite Kerja SAP yang telah bekerja secara profesional dalam menyusun, mengembangkan, dan membantu implementasi SAP. Demikian juga kepada Kelompok Kerja dan Sekretariat KSAP, serta pihak-pihak lain yang mendukung keberhasilan penyusunan dan implementasi SAP.

Semoga Laporan Tahunan 2007 ini dapat menjadi bahan evaluasi dan peningkatan kinerja KSAP pada tahun-tahun mendatang.

Jakarta, April 2008

Direktur Jenderal Perbendaharaan
Selaku Ketua Komite Konsultatif,

Herry Purnomo

PENGANTAR
KETUA KOMITE KERJA
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN



Laporan Tahunan 2007 ini disusun sebagai suatu media akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan kinerja KSAP kepada Menteri Keuangan dan untuk pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Laporan ini memuat kegiatan dan hasil yang dicapai KSAP selama tahun 2007.

Setelah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan, KSAP terus berupaya mendorong implementasi SAP melalui sosialisasi, lokakarya, *Training of Trainers* (TOT), *help desk* serta penyusunan buletin-buletin teknis.

Selama tahun 2007, KSAP telah melakukan penyempurnaan draf SAP berbasis akrual yang terdiri dari Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan dan 12 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Namun, draf SAP berbasis akrual belum dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2007. Hal tersebut disebabkan terjadi perubahan prioritas KSAP, yang semula berprioritas pada penyelesaian draf SAP berbasis akrual menjadi berprioritas pada dukungan terhadap implementasi PP 24/2005 tentang SAP secara lebih intensif. Akibatnya penyelesaian draf SAP berbasis akrual menjadi tahun 2008. Perubahan prioritas KSAP tersebut disebabkan oleh kondisi implementasi PP 24/2005 tentang SAP berbasis kas menuju akrual yang belum dapat dilakukan dengan baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena masih banyaknya laporan keuangan yang mendapat pernyataan *disclaimer* dari BPK.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan KSAP, Laporan Tahunan 2007 ini juga telah memuat informasi keuangan KSAP Tahun 2007.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para anggota Komite Konsultatif SAP, para anggota Komite Kerja, Kelompok Kerja, dan Sekretariat KSAP yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk KSAP.

Kami merasa Laporan Tahunan 2007 belum sempurna, sehingga saran-saran sangat kami harapkan agar penyusunan laporan tahunan berikutnya dapat lebih baik.

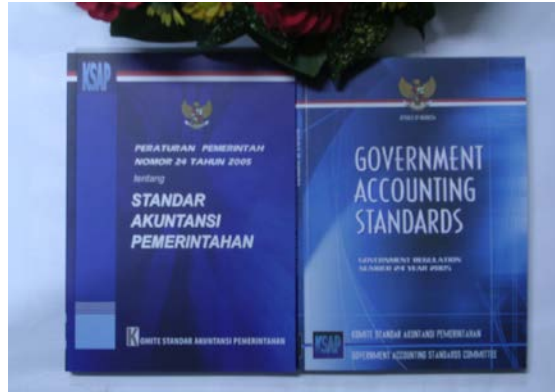
Jakarta, April 2008
Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Komite Konsultatif.....	1
Sambutan Ketua Komite Kerja.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Organisasi dan Kedudukan KSAP	4
B. Tugas Pokok KSAP	6
BAB II RENCANA KERJA KSAP	9
A. Lingkungan Strategis	9
B. Rencana Strategis	9
BAB III KINERJA KSAP	14
A. Capaian Kinerja	14
B. Pelaksanaan Kegiatan.....	14
C. Aspek Keuangan	20
D. Kendala dan Strategi Pemecahannya	21
BAB IV RENCANA KERJA TAHUN 2007	23
BAB V PENUTUP	26

BAB I PENDAHULUAN



Standar Akuntansi Pemerintahan (Government Accounting Standards)

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pemerintah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD yang berupa laporan keuangan. Bentuk dan isi laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 32 menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 57 yang menyatakan bahwa KSAP dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres). Untuk memenuhi ketentuan tersebut telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Pembentukan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 5 Oktober 2004.

A. Organisasi dan Kedudukan KSAP

KSAP yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 84 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 2 Tahun 2005 adalah organisasi yang bersifat independen. Independensi tersebut meliputi keanggotaan dan mekanisme dalam pelaksanaan pekerjaan (*due process*). KSAP beranggotakan kalangan profesional yang berasal dari lingkungan pemerintah, praktisi akuntansi, asosiasi profesi akuntan, dan akademisi yang kompeten di bidang akuntansi sektor publik. Dalam melaksanakan tugasnya, KSAP dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan atau pihak terkait lainnya.

Secara lengkap susunan Komite Konsultatif dan Komite Kerja KSAP sesuai Keppres RI Nomor 2 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

Komite Konsultatif:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri sebagai Anggota;
4. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara sebagai Anggota;
5. Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Akuntan Indonesia sebagai Anggota;
6. Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia sebagai Anggota;
7. Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia sebagai Anggota;
8. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia sebagai Anggota;
9. Ketua Dewan Penasihat Magister Akuntansi Universitas Indonesia sebagai Anggota.

Komite Kerja:

1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Dr. Ilya Avianti, SE, M.Si., Ak sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Sonny Loho, Ak., MPM sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
4. Drs. Sugijanto, Ak., MM sebagai Anggota;
5. Dr. Soepomo Prodjoharjono, Ak., M.Soc.Sc sebagai Anggota;
6. Dr. Hekinus Manao, M.Acc., CGFM sebagai Anggota;
7. Drs. Jan Hoesada, Ak., MM sebagai Anggota;
8. Drs. AB Triharta, Ak., MM sebagai Anggota;
9. Gatot Supiartono, Ak., M.Acc sebagai Anggota;



Tim Konsultatif dan Tim Kerja KSAP (Dokumentasi Sekretariat KSAP)

B. Tugas Pokok KSAP

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2005, KSAP bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah (RPP SAP). SAP mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang wajib dipatuhi dalam penyajian laporan keuangan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep RPP SAP. Penyusunan konsep SAP ini secara operasional dilaksanakan oleh Komite Kerja. Dalam pelaksanaan tugasnya Komite Kerja senantiasa berkonsultasi dan dapat meminta pendapat dari Komite Konsultatif.

Sebagaimana tercantum dalam Keppres Nomor 2 Tahun 2005 dalam mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun RPP SAP, Komite Kerja melakukan proses penyiapan standar (*due process*) yang cermat sesuai dengan praktik penyusunan standar yang baik (*best international practices*). Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas KSAP dalam perumusan dan pengembangan SAP, Komite Kerja membentuk Kelompok Kerja yang tata kerja serta keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Komite Kerja. Kelompok Kerja terakhir kali dibentuk dan sebagaimana telah diubah pada tanggal 10 April 2007 dengan KEP-60/KSAP/IV/2007 beranggotakan 27 orang yang berasal dari berbagai lembaga. Susunan keanggotaan kelompok kerja tersebut sebagai berikut:

1. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM, Ketua;
2. Firmansyah Nazaroedin, Ak., MBA, Wakil Ketua;
3. Margustienny OA, Ak., MBA, Anggota;
4. Moh. Hatta, Ak., MBA, Anggota;
5. Amdi Very Dharma, Ak., MAcc, Anggota;
6. Bambang Pamungkas, SE, Ak., MBA, Anggota;
7. Sumiyati, Ak., MFM, Anggota;
8. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota;
9. Chalimah Puji Astuti, SE, Ak., MAFIS, Anggota;
10. Edward UP Nainggolan, Ak., Anggota;
11. Rahayu Puspasari, SE, MBA, Anggota;
12. Yulia Candra Kusumarini, S.Sos, Anggota;
13. Mulat Handayani, SE, Ak., Anggota;
14. Jamason Sinaga, Ak., SIP, Anggota;
15. Hasanuddin, Ak., M.Ak., Anggota;
16. Farida Aryani, Ak., Anggota;
17. Eli Tamba, SE, Ak., Anggota;
18. Joko Supriyanto, SST, Ak., Anggota;
19. Dita Yuvrita, SE, Ak., Anggota;
20. Syaiful, SE, Ak., Anggota;



21. Hamim Mustofa, Ak., Anggota;
22. M. Rizal Faisol, SST, Ak., Anggota;
23. Sugiyarto, SE., Ak., M.Sc., Anggota.
24. Iwan Kurniawan S., SE., M.Si., Ak., Anggota;
25. Mhd. Syahman Sitompul, SE., Ak., M.Si., Anggota;
26. Heru Novandi, SE., Ak., Anggota;
27. Muliani Sulya F., SE., Anggota.

Selain itu, KSAP juga dibantu oleh Sekretariat KSAP, yang susunan organisasi serta tata kerjanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Komite Konsultatif. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.06/2004 tentang Sekretariat KSAP dan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 210/KM.1/2007, susunan keanggotaan Sekretariat adalah sebagai berikut:

1. Mulat Handayani, Ketua;
2. Chalimah Pujiastuti, Wakil Ketua;
3. Rahayu Puspasari, Anggota;
4. Hamim Mustofa, Anggota;
5. Joko Supriyanto, Anggota;
6. Yulia Candra Kusumarini, Anggota;
7. Yusron Kamal, Anggota;
8. Andri Fuadhy, Anggota;
9. Zulfikar Aragani, Anggota.

Sekretariat KSAP yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan bertugas:

1. Memberikan dukungan administratif kepada KSAP dalam rangka penyusunan dan sosialisasi SAP.
2. Mengelola website KSAP.
3. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya.



BAB II RENCANA KERJA KSAP

Sesuai dengan tugas yang diembannya, KSAP telah menyusun rencana kerja jangka menengah berupa rencana kerja lima tahunan dan rencana kerja tahunan. Rencana kerja ini disusun sesuai dengan program pemerintah dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Berbagai hal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara sebagaimana diuraikan di atas merupakan lingkungan yang sangat mempengaruhi keberhasilan KSAP dalam mencapai kinerjanya.

A. Lingkungan Strategis

Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Pusat/Daerah wajib menyampaikan laporan keuangan pertanggungjawaban APBN/APBD yang telah diperiksa oleh BPK kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir mulai tahun anggaran 2006. Dengan demikian Pemerintah perlu segera membangun sistem akuntansi yang mengacu kepada SAP. Kebutuhan ini tidak dapat ditunda lagi karena hanya ada waktu satu tahun untuk mengembangkan dan mengimplementasikan SAP supaya dapat menghasilkan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meminimalkan asimetri informasi antara pemerintah dan pengguna laporan keuangan, BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah. Kriteria pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan adalah kesesuaian laporan yang dimaksud dengan SAP. Dengan telah diterbitkannya PP tentang SAP, maka Pemerintah Pusat/Daerah sudah wajib menerapkan SAP dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD.

Dengan mencermati perkembangan lingkungan strategis tersebut, KSAP memiliki komitmen untuk selalu bekerja secara terarah dan terencana, dan dituangkan dalam suatu Rencana Strategis KSAP. Visi, Misi, Program, dan Kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis pada dasarnya mengarah pada pemberlakuan SAP yang dapat diterima oleh seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara/daerah yang akuntabel dan transparan.

B. Rencana Strategis

Rencana strategis suatu organisasi memuat visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai. KSAP telah merumuskan rencana strategis dengan visi, misi dan tujuan berikut ini.

Visi :

"Mendukung terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui Standar Akuntansi Pemerintahan yang berkualitas"

Misi :

1. Mewujudkan standar akuntansi pemerintahan yang andal dan diterima secara umum.
2. Mendorong terwujudnya entitas pemerintah yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
3. Mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang mampu memahami dan memanfaatkan informasi keuangan.

Tujuan:

Dari visi dan misi di atas, KSAP menetapkan tujuan-tujuan berikut ini.

1. Menyusun standar akuntansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, praktik dan wacana akuntansi paling mutakhir di Indonesia maupun di lingkungan internasional.
2. Membantu entitas pelaporan menghasilkan laporan keuangan sesuai SAP.
3. Membangun dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan manfaat informasi dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
4. Meningkatkan profesionalisme dan independensi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, KSAP telah menyusun rencana kerja jangka menengah dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 : Rencana Kerja Tahun 2004 s.d. Tahun 2008

A. Tahun 2004	
1. Penerbitan PP SAP	1. Penyusunan draf PP SAP 2. Pembahasan dengan Setneg untuk penerbitan PP SAP
2. Penyusunan buletin teknis dan interpretasi SAP	1. Penyusunan buletin teknis SAP ▪ Neraca Awal ▪ Bagan Perkiraan Standar 2. Penyusunan interpretasi SAP (5 ISAP)
3. Sosialisasi PP SAP	Pelaksanaan Sosialisasi PP SAP di lima kota
4. Draft Publikasian (DP) SAP berbasis akrual	1. Penyusunan standar akuntansi berbasis akrual (KK + 7 PSAP) – Sesuai due process KSAP kecuali public hearing dan permintaan pertimbangan BPK 2. Pelaksanaan <i>Limited Hearing</i> DP SAP akrual 3. Finalisasi Draft SAP akrual
5. SDM KSAP yang andal	Pengembangan SDM: Pengkajian standar dan praktek akuntansi internasional Seminar/kongres/konferensi internasional

B. Tahun 2005		
1. Penyusunan SAP dan Derivasinya	1. Finalisasi RPP tentang SAP 2. Penyusunan buletin teknis dan interpretasi SAP 3. Penyusunan Draf SAP berbasis akrual ▪ Penyusunan 4 Draf SAP berbasis akrual ▪ Pelaksanaan <i>Limited Hearing</i> ▪ Pelaksanaan <i>Public Hearing</i> ▪ Finalisasi Draf SAP	
2. Peningkatan Kompetensi SDM dalam Bidang Akuntansi Pemerintahan	1. Sosialisasi SAP di 7 kota 2. Pengembangan SDM KSAP ▪ Pengkajian standar dan praktek akuntansi internasional ▪ Seminar/kongres/konferensi internasional	
C. Tahun 2006		
1. Draf Publikasian (DP) SAP berbasis akrual	1. Penyusunan DP standar akuntansi berbasis akrual 2. Pelaksanaan <i>Limited Hearing</i> DP SAP akrual 3. Pelaksanaan <i>Public Hearings</i> 4. Finalisasi Draf SAP akrual	
2. Sosialisasi/Bantuan Implementasi SAP	1. Pelaksanaan Lokakarya (<i>Workshop</i>) 2. Penyelenggaraan <i>Helpdesk</i> 3. Pemeliharaan <i>Website</i> KSAP 4. Pelaksanaan <i>Training of Trainers</i>	
3. SDM KSAP yang andal	Pengembangan SDM: ▪ Pengkajian standar dan praktek akuntansi internasional ▪ Seminar/kongres/konferensi internasional	
D. Tahun 2007		
1. Draf PSAP berbasis Akrual	1. Penyusunan DP standar akuntansi berbasis akrual 2. Pelaksanaan <i>Public Hearings</i> 3. Penyempurnaan Draf Kerangka Konseptual dan PSAP berbasis akrual	
2. Penerbitan PP Standar Akuntansi berbasis Akrual		
3. Sosialisasi/Bantuan Implementasi SAP	1. Pelaksanaan Lokakarya/ <i>Workshop</i> 2. Penyelenggaraan <i>Helpdesk</i> 3. Pemeliharaan <i>Website</i> KSAP 4. Pelaksanaan <i>Training of Trainers</i>	
4. SDM KSAP yang andal	Pengembangan SDM: ▪ Pengkajian standar dan praktek akuntansi internasional ▪ Seminar/kongres/konferensi internasional	
E. Tahun 2008		
1. Draf PSAP berbasis Akrual	1. Penyempurnaan DP Kerangka Konseptual dan PSAP berbasis akrual 2. <i>Limited Hearing</i> PSAP Akrual	

2.	Sosialisasi/Bantuan Implementasi SAP dan Pelayanan Publik	3. Permintaan Pertimbangan BPK dan Pembahasan 5. Pelaksanaan <i>Workshop</i> /Sosialisasi SAP dan Bultek Baru SAP CTA 6. Penyelenggaraan <i>Helpdesk</i> 7. Pemeliharaan <i>Website</i> KSAP 8. Penyelenggaraan <i>International Events</i> dan pembentukan asosiasi regional <i>standards setter</i> 9. Survei/Riset Implementasi SAP 10. Penyusunan Kamus Istilah Akuntansi Pemerintahan
3.	SDM KSAP yang andal	Pengembangan SDM: ▪ Pengkajian standar dan praktek akuntansi internasional ▪ Seminar/kongres/konferensi internasional

Berdasarkan rencana kerja jangka menengah, program kerja dan kegiatan KSAP tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. *Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Derivasinya*

a. **Penyusunan draf SAP berbasis akrual**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan penerapan pengakuan pendapatan dan belanja berbasis akrual mulai tahun 2008. Untuk itu, KSAP telah mulai menyusun draf SAP berbasis akrual mulai tahun 2006. Indikator kegiatan ini berupa terselesaikannya draf kerangka konseptual dan draf PSAP berbasis akrual. Pada tahun ini, sasaran kinerja KSAP adalah penyusunan dan penyempurnaan draf kerangka konseptual dan 12 (dua belas) draf SAP berbasis akrual.

b. **Penyusunan buletin teknis dan interpretasi SAP**

KSAP akan menerbitkan Interpretasi SAP (IPSAP) yang dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari kesalahan tafsir para pengguna SAP. KSAP juga akan menerbitkan buletin teknis untuk memberikan arahan/pedoman penerapan PSAP maupun IPSAP. Indikator kinerja kegiatan ini adalah telah diterbitkannya Buletin Teknis.

2. *Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Bidang Akuntansi Pemerintahan*

a. **Workshop SAP (*cash toward accrual*) dan Buletin Teknis**

SAP harus diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah untuk tahun anggaran 2005. Untuk itu, KSAP akan mengadakan workshop mengenai SAP dan buletin teknis. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan para pengguna SAP dapat memahami dan mampu menerapkannya dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2006.

b. **TOT SAP (*cash toward accrual*)**

Sumber daya manusia KSAP masih sangat terbatas untuk dapat melayani seluruh pengguna (user) SAP yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu KSAP merencanakan untuk mengadakan *Training of Trainers* (TOT) yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan kompetensi para calon pengajar di luar KSAP yang akan mensosialisasikan SAP.

c. Pengembangan kemampuan SDM KSAP

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam menyusun SAP berbasis akrual, KSAP perlu meningkatkan kemampuan personilnya. Selain melakukan pengkajian standar dan praktik akuntansi baik untuk internasional maupun di Indonesia, KSAP juga mempunyai rencana mengirimkan para anggotanya untuk mengikuti seminar/kongres/konferensi baik di dalam maupun di luar negeri.

3. Lain-lain

a. Pemeliharaan Website KSAP

Pada tahun 2004, KSAP telah membuat *website* KSAP yang berguna untuk mengkomunikasikan kepada publik mengenai kondisi, kegiatan dan *output* KSAP. Agar *website* tersebut tetap mengkomunikasikan informasi yang *up to date* yang berkaitan dengan KSAP kepada publik, maka KSAP perlu memelihara *website*-nya.

b. Penyelenggaraan Help Desk

SAP merupakan hal yang baru bagi para penyusun laporan keuangan pemerintah dan pengguna SAP lainnya. Untuk membantu para pengguna SAP dalam memahami maupun menerapkannya, KSAP akan membentuk *helpdesk* yang akan menampung pertanyaan-pertanyaan/kesulitan-kesulitan yang dialami para pengguna SAP, kemudian KSAP akan berusaha memberikan pemecahannya.

c. Survei/Riset Implementasi SAP

Survei/Riset Implementasi SAP ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana para pengguna SAP menerapkan SAP dalam penyusunan laporan keuangannya, dan masalah-masalah apa saja yang ditemukan selama penerapan SAP tersebut.

d. Pelayanan Publik

Pelayanan publik ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang berupa pengajaran, konsultasi, dan lain-lain kepada instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya.

BAB III KINERJA KSAP

A. Capaian Kinerja

Sejak awal pembentukannya, KSAP telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka penyusunan standar akuntansi pemerintahan. Sampai dengan akhir tahun 2007, KSAP telah menyelesaikan penyusunan dan penyempurnaan draf SAP berbasis akrual (Kerangka Konseptual dan 12 Pernyataan SAP) serta menetapkan 1 (satu) Buletin Teknis yaitu Buletin Teknis No. 05 tentang Penyusutan. Kegiatan penyusunan dan penyempurnaan SAP beserta derivasinya masih terus dilaksanakan oleh KSAP pada tahun 2007 dan pada tahun-tahun berikutnya. Capaian kinerja KSAP pada tahun 2007 adalah:

- Penyempurnaan draf SAP berbasis akrual yang terdiri dari Kerangka Konseptual dan 12 (dua belas) PSAP.
- Penetapan Buletin Teknis No. 5 tentang Penyusutan.
- Penyusunan 2 (dua) draf buletin teknis, yaitu Buletin Teknis tentang Leasing dan Buletin Teknis tentang Piutang.
- Penyelenggaraan *Workshop* SAP dan Buletin Teknis.
- Penyelenggaraan *Training of Trainers* (TOT) SAP.
- Pengembangan SDM dengan mengirim SDM KSAP untuk mengikuti berbagai seminar, kongres dan konferensi akuntansi baik di luar maupun dalam negeri.
- Sosialisasi SAP pada beberapa Pemda dan Perguruan Tinggi.

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Derivasinya

Kegiatan 1: Penyusunan draf SAP berbasis akrual

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur bahwa pengukuran pendapatan dan belanja dengan basis akrual dilakukan selambat-lambatnya tahun 2008. Oleh karena itu, sesuai dengan rencana lima tahunan, KSAP akan mengembangkan dan menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Sampai dengan akhir tahun 2007, KSAP telah menyusun dan menyempurnakan draf kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dan 12 (dua belas) draf SAP berbasis akrual dengan menggunakan pendekatan menyesuaikan PSAP *cash toward accrual* (sesuai PP Nomor 24 Tahun 2005) dengan PSAP berbasis akrual yang diadaptasi dari IPSAS.

Keduabelas draf SAP berbasis akrual tersebut adalah:

1. Penyajian Laporan Keuangan;
2. Laporan Realisasi Anggaran;
3. Laporan Arus Kas;
4. Catatan atas Laporan Keuangan;
5. Akuntansi Persediaan;
6. Akuntansi Investasi;
7. Akuntansi Aset Tetap;
8. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
9. Akuntansi Kewajiban;
10. Koreksi Kesalahan Mendasar, Perubahan Estimasi dan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan Mendasar dan Pos Luar Biasa;
11. Laporan Keuangan Konsolidasian; dan
12. Laporan Operasional.



Penyelenggaraan Workshop Akuntansi dan Pelaporan Belanja Pemerintah di Jakarta, Maret 2007.

(Dokumentasi Sekretariat KSAP)

Kegiatan 3: Penyusunan Buletin Teknis dan Interpretasi SAP

Pada tahun 2007 ini, KSAP berhasil menetapkan 1 (satu) buletin teknis, yaitu Buletin Teknis SAP No. 5 tentang Penyusutan.

Buletin teknis tersebut melengkapi buletin teknis yang telah ditetapkan pada tahun tahun sebelumnya, yaitu:

1. *Buletin Teknis SAP Nomor 01 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat;*
2. *Buletin Teknis SAP Nomor 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah.*
3. *Buletin Teknis No. 3 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemda Sesuai SAP dengan Konversi; dan*
4. *Buletin Teknis No. 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah.*

Selain itu, pada tahun 2007 ini KSAP telah menyusun 2 (dua) draf buletin teknis, yaitu:

1. *Buletin Teknis tentang Piutang; dan*
2. *Buletin Teknis tentang Leasing.*

2. *Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Bidang Akuntansi Pemerintahan*

Kegiatan 1: Workshop SAP (*cash toward accrual*) dan Buletin Teknis

Pada tahun 2007 ini, KSAP telah menyelenggarakan workshop SAP (*cash toward accrual*) dan Buletin Teknis. Workshop yang diadakan pada bulan April dan Mei Tahun 2007, ditujukan untuk para pejabat di lingkungan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Workshop tersebut bertema "Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2006 sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan". Tujuan diadakannya workshop ini adalah untuk membantu Pemda dalam menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2005. Workshop diadakan di 3 (tiga) kota yaitu:

1. Batam, tanggal 19 April 2007
2. Denpasar, tanggal 19 April 2007
3. Jakarta, tanggal 3 Mei 2007

Peserta workshop rata-rata berkisar 200 orang di setiap tempat, yang berasal dari seluruh wilayah di Indonesia.



Penyelenggaraan Workshop

Akuntansi dan Pelaporan Belanja

Pemerintah di Jakarta, Maret 2007.

(Dokumentasi Sekretariat KSAP)

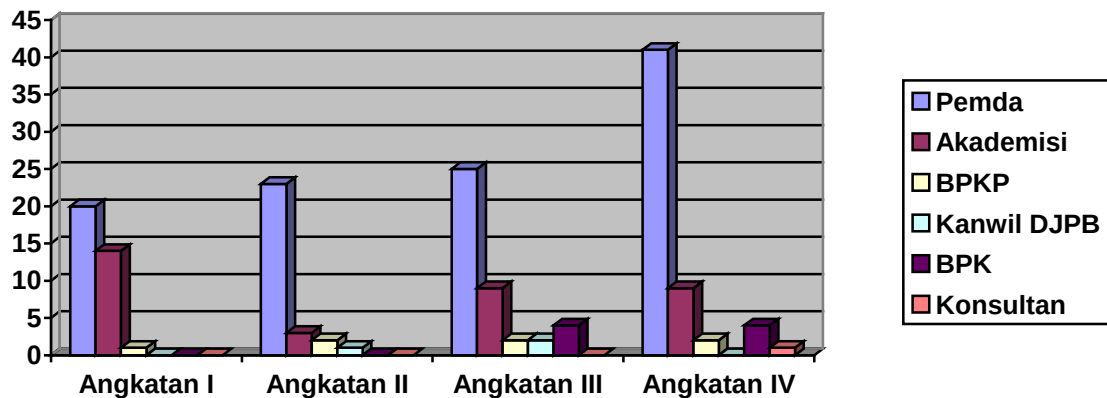
Kegiatan 2: *Training of Trainers (TOT) SAP (cash toward accrual)*

Sebagai tindak lanjut dari *Training of Trainers (TOT)* Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tahun 2006, serta mengingat besarnya animo masyarakat pengguna SAP akan pelaksanaan TOT, maka pada tahun 2007 KSAP menyelenggarakan kembali TOT SAP. TOT SAP ini juga diselenggarakan dalam rangka program penyebarluasan SAP. TOT dilakukan dalam kaitannya dengan tugas pokok Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Keppres Nomor 84 Tahun 2004, yaitu melakukan sosialisasi awal Standar Akuntansi Pemerintahan beserta produk lain yang dihasilkan KSAP. Pelaksanaan TOT dimaksudkan untuk memupuk bibit-bibit yang akan melakukan diseminasi produk KSAP secara lebih luas dan mendalam.

TOT Tahun 2007 dilaksanakan dalam 4 angkatan di tiga tempat yaitu:

TOT SAP	LOKASI	LINGKUP WILAYAH	WAKTU	PESERTA	KETERANGAN
Angkatan I	Jakarta	Jawa dan Kalimantan	27-31 Agts 2007	Pemda : 20 Akademisi : 14 BPKP : 1	28 lulus 7 tidak lulus
Angkatan II	Jakarta	Sumatera, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku dan Papua	3-7 Sept 2007	Pemda : 23 Akademisi : 3 BPKP : 2 Kanwil DJPB : 1	33 lulus 6 tidak lulus
Angkatan III	Denpasar	Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku dan	26-30 Nov 2007	Pemda : 25 Akademisi : 9 BPKP : 2 Kanwil DJPB : 2	28 lulus 14 tidak lulus

		Papua		BPK : 4	
Angkatan IV	Yogyakarta	Jawa, Sumatera dan Kalimantan	3-7 Des 2007	Pemda :41 Akademisi : 9 BPKP : 2 Konsultan : 1 BPK : 4	40 lulus 17 tidak lulus



Sebelum mengikuti *TOT*, peserta harus memenuhi beberapa kualifikasi yang telah ditetapkan oleh KSAP antara lain:

- Sarjana Ekonomi (diutamakan jurusan Akuntansi);
- Berkecimpung langsung dalam bidang akuntansi keuangan pemerintah daerah;
- Memiliki kemampuan mengajar/memberikan asistensi;
- Bersedia menjadi fasilitator KSAP apabila diperlukan;
- Dapat mengoperasikan komputer;

Materi *TOT* mencakup:

- Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah;
- Struktur, Siklus dan Akuntansi Anggaran;
- Akuntansi dan praktik Penyusunan Laporan Keuangan;
- *Pre Test* dan *Post Test*, serta
- Presentasi dari masing-masing peserta *TOT*



*Training of Trainers (TOT) mengenai SAP Di
Jakarta, November 2007.*

(Dokumentasi Sekretariat KSAP)

Kegiatan 3: Pengembangan Kemampuan SDM KSAP

Di bidang pengembangan SDM, KSAP mengirim beberapa anggotanya mengikuti seminar, kongres, dan konferensi baik di dalam negeri maupun luar negeri, yaitu:

1. *Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and reporting 24th Session*, Genewa;
2. *Asean Federation of Accountant (AFA) Congress*, Jakarta;
3. Kongres Luar Biasa IAI;
4. *Implementation of IAS 39 and IAS 32*, Jakarta;
5. *International Seminar on Decentralization*, Jakarta.

Kegiatan 4: Pemeliharaan Website KSAP

Dalam rangka memberi informasi mengenai organisasi KSAP dan produk standar akuntansi yang dihasilkan, KSAP juga telah membangun Website KSAP dengan alamat: <http://www.ksap.org> yang dikelola oleh Sekretariat KSAP sejak Juli 2004. Pengembangan Website ditujukan pada ekspose PSAP dan Draf PSAP dan berbagai informasi penting lainnya yang diperlukan para pengunjung website. Pada website tersebut juga tersedia email untuk para anggota KSAP.

Selama tahun 2007, KSAP telah berhasil meng *up-grade* tampilan maupun isi dari situs KSAP. Perbaikan tampilan dimaksudkan agar situs KSAP menjadi lebih menarik dan lebih informatif serta memberikan peluang lebih luas kepada pengunjung situs. Selain itu dengan tambahan menu *English Version* pada tampilan yang baru diharapkan dunia internasional dapat mengenal produk-produk KSAP terutama Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah tersedia dalam versi bahasa Inggris. Kegiatan pemeliharaan lainnya adalah meng-*update* berita, produk-produk maupun *link* dengan kegiatan reformasi keuangan negara lainnya.



Keterangan : Tampilan Website KSAP <http://www.ksap.org>

Kegiatan 5: Penyelenggaraan Help Desk

SAP merupakan hal yang baru bagi para penyusun laporan keuangan pemerintah dan pengguna SAP lainnya. Untuk membantu para pengguna SAP dalam memahami maupun menerapkannya, KSAP telah membentuk tim *helpdesk* yang dibentuk dengan Keputusan Ketua Komite Kerja tanggal 5 Oktober 2006. Tim ini terdiri dari 4 (empat) orang Komite Kerja, dan 9 orang Kelompok Kerja yang bertugas menampung pertanyaan-pertanyaan/kesulitan-kesulitan yang dialami para pengguna SAP dan memberikan pemecahannya. Selama tahun 2007 KSAP telah menanggapi beberapa pertanyaan antara lain yang terkait dengan telaah Permendagri 13/2006, Perlakuan Akuntansi atas transaksi Perjanjian Karya Production Sharing, Penilaian aset pada Neraca Awal Pemerintah Pusat, Pengakuan Investasi Deposito, dan Akuntansi pada Pusat Investasi Pemerintah sebagai BLU. Tanggapan disampaikan secara tertulis dan telah dipublikasikan dalam *website* KSAP.

Kegiatan 7: Pelayanan Publik

Pada tahun 2007, KSAP telah memenuhi beberapa permintaan dari berbagai instansi antara lain dari instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya untuk menjadi nara sumber tentang SAP. Selain itu KSAP bekerja sama dengan Poltek Bandung dalam penyelenggaraan TOT SAP tanggal 10 – 14 Desember 2007.

C. Aspek Keuangan

Untuk melaksanakan kegiatan tahun 2007, KSAP mendapatkan alokasi dana sebesar Rp3.495.270.000 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komite Standar Akuntansi Pemerintahan – Departemen Keuangan. Pada pertengahan tahun anggaran terjadi pemotongan anggaran perjalanan dinas yang bersifat tidak mengikat sesuai dengan kebijakan Pemerintah. Untuk mencapai target kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2007, KSAP telah merealisasikan sebesar Rp2.899.680.125 atau sekitar 91,57% dari pagu anggaran setelah pemblokiran sebesar Rp. 3.170.270.000,00.

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran Setelah revisi	Realisasi Belanja	Persentase
51	Belanja Pegawai	567.600.000	550.600.000	97,00%
52	Belanja Barang	2.827.920.000	2.255.461.125	79,76%
53	Belanja Modal	99.750.000	96.800.000	97,04%
57	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0%
Jumlah		3.495.270.000	2.902.861.125	83,02%
Setelah Pemotongan Biaya Perjalanan Dinas Tidak Mengikat				
Anggaran Setelah Pemotongan			Realisasi Belanja	Persentase Riil
3.170.270.000			2.902.861.125	91,57%

Laporan Keuangan KSAP secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

D. Kendala dan Strategi Pemecahannya

Pada tahun 2007 ini ada beberapa kendala yang dihadapi oleh KSAP, antara lain adalah sejak awal pembentukannya, sebagian besar anggota KSAP (Komite Kerja, Kelompok Kerja, dan Sekretariat) berasal dari pegawai di lingkungan pemerintahan yang mempunyai tugas pokok masing-masing, sehingga waktu yang tersedia sangat terbatas. Untuk memecahkan kendala tersebut di atas, KSAP melakukan beberapa upaya, yaitu: mengefektifkan setiap agenda kegiatan rapat dan penyelesaian pekerjaan dan meneliti kembali skala prioritas pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Selain itu, pada tahun 2007, di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan telah dibentuk Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan dibentuknya organisasi setingkat subdirektorat tersebut diharapkan akan mendukung pelaksanaan tugas KSAP.

BAB IV RENCANA KERJA TAHUN 2008

Untuk mendukung implementasi SAP tahun 2008 dan pengembangan SAP berbasis akrual, pada tahun 2008 KSAP merencanakan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyempurnaan Draf SAP Berbasis Akrual

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan Pemerintah untuk menerapkan standar akuntansi berbasis akrual mulai tahun 2008. Untuk mendukung terlaksananya amanat tersebut, KSAP pada tahun 2008 akan melakukan finalisasi draf Kerangka Konseptual dan 12 (dua belas) draf PSAP berbasis akrual.

2. Penyusunan Buletin Teknis SAP CTA

Pada tahun 2008 KSAP akan melakukan finalisasi 2 (dua) buletin teknis SAP dan menyusun 8 (delapan) buletin teknis SAP, Buletin-buletin teknis tersebut yaitu:

1. Piutang
2. Leasing
3. Hibah
4. Bantuan Sosial
5. Utang
6. Pinjaman Luar Negeri
7. Dana Bergulir
8. Penerus Pinjaman
9. lain-lain (Pendapatan, Selisih Kurs, KSO, Akuntansi SUN, ORI, SUKUK)

Penentuan Topik Buletin Teknis SAP ditentukan berdasarkan hasil survei, yang dilakukan oleh KSAP bekerjasama dengan Departemen Dalam Negeri, kepada para pengguna SAP termasuk di dalamnya adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tujuan dari penyusunan buletin teknis tersebut adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam terhadap *issue* tertentu yang ditemui dalam SAP berbasis kas menuju akrual, sehingga para pengguna dapat memahami dan melaksanakan SAP dengan baik.

3. Penyelenggaraan *Limited Hearing* DPSAP Berbasis Akrual

Sesuai dengan *due process* penyusunan SAP, KSAP akan melaksanakan 1 (satu) kali *limited hearing* atas draf SAP berbasis akrual (draf Kerangka Konseptual dan 12 (dua belas) draf PSAP berbasis akrual. Tujuan *limited hearing* adalah untuk mendapatkan masukan atas draf

SAP yang disusun. Peserta *limited hearing* diharapkan berasal dari para akademisi dan praktisi akuntansi pemerintahan.

4. Workshop SAP (*cash toward accrual*) dan Buletin Teknis Baru SAP CTA

Pada tahun 2008 KSAP akan mengadakan *workshop* mengenai SAP dan buletin teknis baru *cash towards accrual*. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan para pengguna SAP dapat memahami dan mampu menerapkannya dalam penyusunan laporan keuangan.

6. Pemeliharaan Website KSAP

Pada tahun 2004, KSAP telah membuat *website* KSAP yang berguna untuk mengkomunikasikan kepada publik mengenai kondisi, kegiatan dan *output* KSAP. Agar *website* tersebut tetap mengkomunikasikan informasi yang *up to date* yang berkaitan dengan KSAP kepada publik, maka KSAP perlu memelihara *website*-nya. Para pengunjung dapat mendownload dan mengajukan pertanyaan melalui email KSAP yang tersedia dalam situs www.ksap.org.

7. Pemeliharaan Helpdesk

Tim *Helpdesk* yang telah dibentuk pada tahun 2006 akan terus melakukan tugasnya pada tahun 2008. Diharapkan dari penyelenggaraan *helpdesk* ini akan dibuat suatu Buku *Frequently Asked Question* (FAQ) yang memuat pertanyaan/permasalahan dan jawaban/ pemecahan permasalahan seputar implementasi SAP.

8. Pengembangan SDM KSAP

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam menyusun SAP berbasis akrual, KSAP perlu meningkatkan kemampuan personilnya. Selain melakukan pengkajian standar dan praktek akuntansi baik internasional maupun di Indonesia, KSAP juga mempunyai rencana mengirimkan para anggotanya untuk mengikuti seminar/kongres/konferensi baik di dalam maupun di luar negeri.

9. Survei/Riset Implementasi SAP

Survei/Riset Implementasi SAP ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana para pengguna SAP menerapkan SAP dalam penyusunan laporan keuangannya, dan masalah-masalah apa saja yang ditemukan selama penerapan SAP tersebut. Selain itu, riset juga dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan implementasi SAP berbasis akrual.

10. Penyusunan Kamus Istilah Akuntansi Pemerintahan

Dalam rangka memperoleh persepsi dan pemahaman yang sama terhadap suatu istilah dalam akuntansi pemerintahan dan juga untuk mempermudah para pengguna akuntansi pemerintahan dalam memperoleh pengertian suatu istilah akuntansi pemerintahan, maka pada tahun 2008 KSAP akan menyusun suatu kamus istilah akuntansi pemerintahan.

11. Pelayanan Publik

Pelayanan publik ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang berupa pengajaran, konsultasi, dan lain-lain kepada instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya.

12. *International Events*

Untuk mensejajarkan KSAP dengan *government/public accounting standard setting body* di dunia internasional, maka pada tahun 2008 KSAP akan menyelenggarakan *International Events*. Hal ini masih bersifat tentatif tergantung dari peninjauan yang akan dilakukan atas kemungkinan penyelenggaraan kegiatan ini pada tahun 2008.

BAB V PENUTUP

Laporan Tahunan 2007 ini merupakan laporan pertanggungjawaban KSAP dan diharapkan dapat dijadikan sebagai media evaluasi, khususnya bagi KSAP dan pihak-pihak yang berkepentingan. Masukan dari berbagai pihak baik mengenai substansi standar, interpretasi, buletin teknis, bantuan implementasi, dan hal-hal lainnya dapat diberikan kepada KSAP agar di masa mendatang KSAP dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan dan menyusun standar akuntansi pemerintahan serta memberi dukungan teknis implementasi SAP sehingga dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.



**KOMITE STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

**LAMPIRAN
LAPORAN TAHUNAN**

2007

ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY

Sekretariat :
Gedung Perbendaharaan II, Lantai 2
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta Pusat
Telp/Fax. 021 3524551
Website. ksap.org
Email. webmaster@ksap.org ; ksap_info@yahoo.com